



Pro-Kontra Reklamasi

Gubernur Setuju Jangan Dibiarkan Berlama-lama

Denpasar (Bali Post) –

Krama adat di Bali telah mengikat janji untuk berjuang terus melawan kapitalisme. Mereka juga terus berjuang untuk menyelamatkan alam Bali dari pengusaha yang rakus. Demikian penegasan Aliansi Tokoh dan Masyarakat Bali (ATMB) Prof. Dr. Ketut Rahyuda, MSIE., Selasa (19/7) kemarin.

Oleh karena itu, katanya, pemimpin di Bali harus segera mengambil sikap untuk menolak reklamasi. "Sebab, semakin lama keputusan terbentuk maka semakin parah persepsi masyarakat tentang kesungguhan pemimpin Bali membela rakyatnya. Ketika waktu menjadi permainan maka masyarakat menjadi tambah jauh melihat

kualitas kinerja pemerintah dan legislator," pungkas Guru Besar Unud ini.

Sementara itu, Bendesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya mengatakan, pemimpin di Bali semestinya peka dengan aspirasi rakyat. Terkait pernyataan Gubernur yang minta petunjuk kepada Ketua DPRD Bali soal reklamasi, Wijaya yang anggota DPRD Badung itu cukup menyalskan. Sebab, selaku pemimpin tertinggi di Bali seharusnya tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Dengan sikap yang demikian, maka akan membuat perjuangan rakyat Bali menolak reklamasi semakin panjang.

Hal. 19
Belum Jelas

Belum Jelas

Dari Hal. 1

Diwawancarai terpisah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika sependapat bila pro-kontra reklamasi Teluk Benoa tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Oleh karena itu harus ada kepastian apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Mengingat kewenangan untuk mencabut atau mempertahankan Perpres No.51 Tahun 2014 ada di Presiden, bukan pada dirinya selaku gubernur.

Sementara itu, sikap anggota DPRD Bali terkait reklamasi juga belum jelas. Sikap 38 desa adat menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tidak lantas diikuti wakil mereka yang duduk di DPRD Bali. Dari lima fraksi yang ada, hanya satu fraksi yang menyatakan menolak. Sementara sisanya, secara umum menunggu keputusan Presiden terkait rencana meng-urug Teluk Benoa seluas 700 hektar itu.

Anggota Fraksi Panca Bayu Nyoman Tirtawan, Selasa kemarin, mengatakan mayoritas anggota Fraksi Panca Bayu menolak reklamasi karena alasan logis, bukan personal. Saat ini, Bali berada pada momen kekurangan wisatawan namun surplus akomodasi yang menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat.

"Sekarang dengan reklamasi ini, *ending*-nya menambah akomodasi akan menambah sakit pariwisata. Pariwisata tambah tidak sehat. Itu juga momennya belum bagus, tempatnya juga tidak bagus karena daerah rawan dengan konflik, termasuk juga *traffic*-nya," jelasnya.

Ketua Fraksi Golkar I Wayan Gunawan meminta Gubernur agar mengungkap apa yang terkait dengan reklamasi mulai dari perencanaan sampai pada proses yang terakhir. Dengan informasi yang sejelas-jelasnya, diharapkan masyarakat semakin jernih

memahami rencana tersebut. Termasuk mulai sadar atas bentuk responsnya menyangkut reklamasi.

Anggota Fraksi Demokrat Ngakan Made Samudra mengatakan, sah-sah saja bila timbul pro dan kontra terkait reklamasi. Di era reformasi, sebuah kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Namun yang jelas, DPRD Bali sudah meminta kepada Gubernur bahkan akan bersama Gubernur menghadap Presiden untuk mempertegas masalah reklamasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Kadek Diana mengatakan, sikap fraksinya sama dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Dalam hal ini meminta Gubernur agar menanyakan langsung kepada Presiden. Kalau perlu, mengirim surat resmi atas nama lembaga untuk mendapatkan kejelasan mengenai reklamasi. (kmb27/kmb32)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2014

Hal : 1 dan 19



Kasus Dugaan Perdin Fiktif Dikebut Anggota Dewan dan Sekwan Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menetapkan satu orang tersangka dari PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dalam kasus dugaan perjalanan dinas (perdin) fiktif DPRD Kota Denpasar, penyidik kejaksaan terus mengejar pemeriksaan saksi lain untuk menambah data sebelumnya. Salah satunya yang diperiksa, Selasa (19/7) kemarin adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Denpasar IG Rai Suta.

Informasi lainnya, selain Rai Suta, stafnya yang bernama Juana juga diperiksa. Yang menarik, anggota dewan juga ada yang diperiksa, yakni A.A. Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat) dan Ketut Arya Saputra (mantan anggota dewan dari Fraksi Demokrat). Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar Syahrir Sagir yang dimintai konfirmasi, membenarkan adanya pemeriksaan saksi tersebut. Dikatakannya, Sekwan diperiksa karena memang posisinya sebagai atasan aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD/Dewan (Setwan) Denpasar. Bahkan, pemeriksaan dia cukup lama. "Itu wajar jika pemeriksaan Sekwan paling lama," terang Syahrir.

Soal materi pemeriksaan, Syahrir menyebutkan, pemeriksaan lebih banyak kepada peran

Sekwan dalam agenda perjalanan dinas. Sebagai pejabat tinggi di Sekretariat DPRD Kota Denpasar, hampir semua anggaran yang digunakan atas izin serta pengetahuan Sekwan. "Kalau Sekwan tidak tanda tangan, dananya kan tidak bisa cair," tandasnya.

Dalam kasus ini, Sekwan juga sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang dinilai sebagai pihak paling mengetahui aliran dana serta mekanisme kunjungan kerja anggota dewan ke luar daerah.

Saat ini, yang dibidik Kejari Denpasar yakni agenda perdin tahun 2013. Selama setahun, anggaran perdin mencapai Rp 6 miliar. Jika digabungkan dengan anggaran bintek (bimbingan teknis), mencapai Rp 10 miliar.

Dalam kasus ini, Syahrir belum mau membuka nama tersangka yang sudah diumumkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar Erna Normawati Widodo Putri. Menurut Syahrir, potensi tersangka juga bisa terjadi pada pihak lain. "Indikasi *mark-up* tiket ini kenapa bisa terjadi, itulah yang akan kami dalami. Pokoknya, semua pihak yang terlibat dalam perkara ini bisa jadi tersangka, tergantung hasil pemeriksaan nanti," tutup Syahrir. (kmb37)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 2



Investor Langgar SK Gubernur Pengkajian Gunakan PT Luar Daerah



Bali Post/dck

TOLAK REKLAMASI - Ratusan krama Bali menggelar aksi tolak reklamasi di depan kantor Gubernur Bali, beberapa pekan lalu.

Denpasar (Bali Post) -

Laporan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bali 2015 di DPRD Bali memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah provinsi. Salah satunya terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Pansus menyatakan masalah ini perlu dipikirkan dan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Hal tersebut untuk mencari pemahaman dan pola pikir yang sama terkait dengan maraknya demo masyarakat.

"Kalau melihat aturan normatifnya kan ini perpresnya kewenangan presiden. Mungkin kalau di tingkat provinsi membuat keputusan untuk mengumpulkan ataukah menyampaikan aspirasi masyarakat Bali. Tetapi di satu sisi kan punya problem karena awalnya kan dia yang bersurat dulu, kan pemerintah daerah juga ngusulin," ujar Ketua Pansus I

Nyoman Adnyana usai Rapat Paripurna di DPRD Bali, Selasa (19/7) kemarin.

Adnyana menambahkan, perlu dibahas pula mengenai isi SK Gubernur Bali No. 1727 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa. Sebab, dalam SK itu (No. 1727/01-B/HK/2013), pemegang izin wajib melakukan kerja sama dalam melaksanakan studi kelayakan dengan perguruan tinggi (PT) setempat. "Tetapi kan investor memakai kajian dari perguruan tinggi di luar Bali. Itu persoalan, makanya itu harus dibahas. Kalau dikaitkan dengan SK itu harus perguruan tinggi setempat (di Bali - red), bisa dikatakan melanggar itu," imbuhnya.

Hal. 19
Kerja Sama

Edisi : Rabu, 20 Juli 2016

Hal : 1



Kerja Sama

Dari Hal. 1

Seperti diketahui SK Gubernur Bali tertanggal 16 Agustus 2013 itu dalam klausul MEMUTUSKAN pada poin ketiga butir ke-2 disebutkan; Pemegang izin studi kelayakan wajib melakukan kerja sama dalam melaksanakan studi kelayakan dengan perguruan tinggi setempat. Butir ke-3 juga disebutkan; mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat pesisir Teluk Bena dan sekitarnya, tentang rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Bena.

Di sisi lain, lanjut Adnyana, dinamika penolakan masyarakat sekarang semakin terbuka dan gelombangnya semakin besar. Masyarakat khususnya dari 38 desa adat yang menolak reklamasi juga sudah relevan, dalam arti memang daerahnya berhubungan langsung dengan rencana reklamasi.

Izin Lokasi

Sementara itu, Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana mengatakan, izin lokasi reklamasi yang dikelu-

arkan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara otomatis diperpanjang per 14 Juli lalu. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menjawab surat permohonan perpanjangan izin dari investor.

Gendo melihat Menteri Susi justru memilih untuk melihat reklamasi dalam kacamata hukum yang sangat positivistik tanpa mau melihat bagaimana sejarah kasus ini yang penuh manipulasi. Begitu juga tanpa mau melihat perjuangan rakyat selama empat tahun. Padahal dalam Undang-undang, No.27 Tahun 2007, masyarakat adat adalah entitas yang mendapat prioritas penuh dalam kebijakan pesisir, termasuk reklamasi Teluk Bena.

"Artinya Susi menempatkan dirinya sebagai petugas administrasi yang hanya melihat prosedur formal. Masak urusan reklamasi hanya urusan administrasi semata. Dia juga mesti tahu bahwa Perpres No. 51 Tahun 2014 itu dibuat dengan sengaja hanya untuk memfasilitasi reklamasi investor yang terganjal kawasan konservasi," jelasnya.

Menurut Gendo, dalam Perpres No.122 Tahun 2012, men-

teri jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan penolakan perpanjangan izin lokasi. Jika disandingkan dengan UU 27/2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada pasal 17 menitikberatkan pada perlindungan masyarakat adat setempat.

"Nah pada saat rakyat adat pesisir menolak reklamasi, maka menteri dengan kewenangannya dapat menolak perpanjangan izin lokasi reklamasi. Alasan itu kan dapat dipertanggungjawabkan kalau saja Susi serius menangani kasus ini," tandasnya.

Anggota DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, terpenting sekarang harus ada ketegasan dari Presiden RI terkait Perpres No.51 Tahun 2014. Sebab, perpres inilah yang dijadikan dasar perpanjangan izin lokasi.

"Apabila dicabut atau revisi tentu perpanjangan tersebut akan gugur dengan sendirinya. Saya percaya Presiden Joko Widodo tidak akan melupakan ucapan beliau saat pidato kemenangannya di Bali pada tahun 2014. Jangan sampai Bali bunuh diri akibat eksploitasi yang berlebihan di dunia pariwisata," ujarnya. (kmb32)



Dewan Ingatkan Eksekutif

Temuan BPK Tak Boleh Berulang Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Laporan keuangan Pemprov Bali memang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Namun, opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan bahwa permasalahan tata kelola keuangan daerah sudah berjalan baik dan sempurna. Pasalnya, temuan-temuan BPK dari tahun ke tahun belum sepenuhnya dapat diselesaikan.

"Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas ketidaksesuaian dengan perundang-undangan juga masih belum terlaksana," ujar Ketua Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bali 2015, I Nyoman Adnyana, dalam Rapat Laporan Pansus antara DPRD Bali dan Pemprov Bali di ruang sidang utama DPRD Bali, Selasa (19/7) kemarin.

Adnyana menambahkan, dari komparasi hasil audit

tahun-tahun sebelumnya, pihaknya kembali melihat beberapa permasalahan yang masih menjadi catatan penting BPK. Seperti masalah aset, pengakuan utang-piutang, tertib administrasi *performance* laporan dengan sistem akrual dan lain-lain. Pemprov Bali disarankan untuk melakukan langkah-langkah jitu agar permasalahan itu tidak berulang menjadi temuan BPK.

"Temuan BPK tidak boleh berulang tahun. Tapi WTP,

kita semua berharap dapat terus berulang tahun," jelas politisi PDI Perjuangan asal Bangli ini.

Adnyana mencontohkan, temuan BPK terhadap pe-natausahaan piutang pajak kendaraan bermotor belum tertib merupakan temuan BPK tahun lalu. Tahun ini menjadi temuan lagi terhadap kekurangan penerimaan atas piutang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. "Catatan tahun lalu,

kami sarankan eksekutif untuk segera membuat rencana aksi dan segera melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Eksekutif harus bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan tersebut, karena berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah," imbuhnya.

Berdasarkan potret realisasi APBD Bali 2015, lanjut Adnyana, aspek perencanaan baik pendapatan, belanja dan Silpa di masa mendatang perlu lebih realistis, akurat, dan berhasil guna didasari data yang valid. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur, secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam konteks

belanja, pemprov harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

"Dari sisi belanja (APBD 2015 - red), terdapat penghematan sebesar Rp 561 miliar lebih. Kami sependapat bahwa efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD harus terus kita tingkatkan. Namun dari pengamatan kami, banyak program dan kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan gagal tender, mepetnya waktu pelaksanaan dan persoalan teknis lainnya," urainya. (kmb32)

Edisi : Rabu 20 Juli 2016

Hal : 7



Bansos Tak Terencana Harus Tepat Sasaran

Gianyar (Bali Post) -

Kalangan DPRD Gianyar mengingatkan pemerintah agar mengarahkan bantuan sosial (bansos) tak terencana sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Jangan sampai bantuan salah sasaran apalagi dipolitisasi.

Ketua Komisi IV DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara, Selasa (19/7) kemarin mengungkapkan, pihaknya menilai bansos tak terencana sangat membantu masyarakat miskin yang memerlukan uluran tangan secepatnya dari pemerintah. Pihaknya pun mengaku siap mendukung pemerintah apabila diperlukan penambahan anggaran ke depan. "Masih banyak keluarga miskin yang memerlukan bantuan. Kalau memang diperlukan, kami di dewan akan *support* untuk tambahan anggaran," katanya.

Politisi PDI-P ini mengatakan, bansos yang disalurkan untuk kepentingan yang sifatnya mendadak tersebut harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin. Jangan sampai bantuan salah sasaran apalagi diarahkan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. "Apalagi sekarang kan sudah mau dekat-dekat Pilkada. Tentu kita tidak mau bantuan ke masyarakat sampai dipolitisir," tegasnya.

Guna memastikan penyaluran tepat sasaran, pihaknya di dewan mengaku siap menjalankan fungsi pengawasan bansos tak terencana. "Bantuan ini harus untuk masyarakat miskin," katanya. Untuk diketahui, selain bantuan rutin, Pemkab Gianyar juga mengalokasikan anggaran bansos tak terencana. Bansos ini sifatnya tidak terus-menerus, tidak terencana atau mendadak dan diberikan selektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan juga untuk menangani korban bencana alam. (kmb25)

Edisi : Rabu, 20 Juli 2011

Hal : 7